

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Adami Chazami. 2019. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang. Media Nusa Creative
- Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 1981. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Djisman Samosir. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung. Penerbit Nuansa Aulia.
- Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju.
- Fathul Wahid. 2002. *Kamus Istilah Teknologi Informasi*. Yogyakarta. Andi Offset.
- I Ketut Sudjana. 2013. *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*. Universitas Udayana : Fakultas Hukum.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Leden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*. Bandung. Alumni.
- Makamah Agung RI. 1994. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Jakarta. Makamah Agung.
- M Karjadi dan R.Soesilo. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar*. Bandung. Politeria.

- Mukti Fajar Nurdan Dewanta. 2010. Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- R. Subekti. 2015. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. PT. Balai Pustaka Persero
- R Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bogor. Politeria
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung. Pt Citra Aditya Bakti
- R. Wirjono Podjodikoro. 1970. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung. Penerbit Sumur.
- S. Amin. 1981. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta. Pradnya Pramita.
- Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish
- Sintha Dewi HTP. 2012. *Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) Di Persidangan Perkara Pidana*. Jakarta. FH UI.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Suryono Sutarto. 1987. *Sari Hukum Acara Pidana I*. Semarang. Yayasan Cendikia Purna Dharma.

Van Pramodya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang. Aneka Ilmu.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

## **C. Jurnal**

Dian Erdianto. Eko Soponyono. Tahun 2015. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia*. Jurnal Law Reform. Volume 11.

Norika Fajriana. Maret 2018. *Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan*, Badamai Law Journal. Vol. 3. Issues.

Poetri Novendis L.K.W. 2015. *Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Diberikan Melalui Teleconference Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah.

Ruth Marina Damayanti Siregar. 2015. *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Jurisprudence. Vol. 5 No. 1

#### **D. Website**

Mys. "Menguji kesaksian *secra teleconference*". Hukum Online. Juli 2003.

